

TESIS

**KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENCEGAH TERJADINYA TIPIKOR DI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR**



Oleh :

BRAMANTO WISYNU WARDHANA

NIM : 1162100005

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

TESIS
KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENCEGAH TERJADINYA TIPIKOR DI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

THESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Oleh :

BRAMANTO WISYNU WARDHANA
NIM : 1162100005

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

TESIS
KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR DALAM
MENCEGAH TERJADINYA TIPIKOR DI PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR



Oleh :

BRAMANTO WISYNU WARDHANA
NIM : 1162100005

PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Disetujui Tanggal 16 Desember 2022

Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.

NPP. 20110.86.0062

Dr. Achluddin Ibnu Rochim, S.H., M.Si.

NPP. 20110.96.0463

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mengetahui

Dekan



Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, MP.

NPP. 20120.87.0103

Mengesahkan

Ketua Program Studi



Prof. Dr. Agus Sukristyanto, MS.

NPP. 20120.90.0203

HALAMAN PENGESAHAN

**Dipertahankan di depan Sidang Dewan Penguji
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh
Gelar Magister**

Pada Tanggal 16 Desember 2022

**1. Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.
NPP. 20110.86.0062**

**2. Dr. Dra. Rachmawati Novaria, MM.
NPP. 20120.93.0298**

**3. Dr. IGN. Anom Maruta, MM.
NPP. 20120.86.0056**

**Mengetahui ;
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


**Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP.
NPP 20120.87.0103**

**PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bramanto Wisynu Wardhana
Alamat : Gadel Sari Madya No 16 Surabaya
Email : bramantoww@gmail.com
Telepon/HP : 08128772706

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **Kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Terjadinya TIPIKOR di Pemerintah Provinsi Jawa Timur** adalah murni gagasan, rumusan, pemikiran dan penelitian saya sendiri, Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi kode etik atau sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan dunia Pendidikan.

Surabaya, 5 Januari 2023
Yang membuat pernyataan



Bramanto Wisynu Wardhana
NIM : 1162100005



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bramanto Wisynu Wardhana
NBI/ NPM : 1162100005
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Jenis Karya : ~~Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

KEWENANGAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENCEGAH TERJADINYA TIPIKOR DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 5 Januari 2023

Yang Menyatakan,



(Bramanto Wisynu Wardhana)

*Coret yang tidak perlu

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Terjadinya TIPIKOR Di Pemerintah Provinsi Jawa Timur” Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Surabaya. Adapun selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak yang telah membantu serta mendoakan penulis, oleh sebab itu pada bagian ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. V. Rudy Handoko, M.S dan Dr. Achluddin Ibnu Rochim, S.H, M.Si atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dan perkuliahan.
2. Ketua program studi Pascasarjana Magister Administrasi Publik Bapak Prof. Dr. Agus Sukristyanto, M.S.
3. Seluruh Dosen program, Pascasarjana Magister Administrasi Publik yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Administrasi Publik.
4. Bagian Tata Usaha Magister Administrasi Publik Bu Inna dan Pak Supri yang telah membantu Segala Proses perkuliahan dan memberikan informasi setiap saat.
5. Ayahanda Priyanto Wirokaryo, Ibunda Almarhum Dwi Kendro Wardhani, adik adik saya Prita, Bobby dan Ira atas segala dukungan dan doanya.
6. Mertua saya papa tikno dan mama kessy atas supportnya selama ini.
7. Istri saya Yeyen., atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta bantuannya selama ini, Ananda tercinta Tania dan Bryan yang mau membantu papa nya waktu kuliah.
8. Bapak Inspektur Dr. Drs. Helmy Perdana Putera, M.Si, CGCAE yang telah meluangkan waktu dan membantu memberikan masukan.
9. Pejabat Struktural, Teman teman Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang telah meluangkan dan memberikan kontribusi dalam wawancara.
10. Rekan rekan mahasiswa MAP 53 dan kelompok semangat tesis Untag Odisti, Shofyan yang susah senang ditanggung bersama.
11. Rekan rekan Tata Usaha Inspektorat Provinsi yang telah membantu kelancaran tesis ini.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Surabaya, Desember 2022

Bramanto Wisynu Wardhana

Abstract

This study aims to determine the constraints on the authority of the Inspectorate of East Java Province in preventing criminal acts of corruption within the East Java Provincial Government, using normative legal research methods that are analytical descriptive. The results of the research show that the authority of the Provincial Inspectorate which has been regulated in laws and regulations needs to be revised to strengthen the position of the Inspectorate in its authority to prevent acts of corruption in the Regional Government. Changes to laws and regulations are the main thing that needs to be revised because the position of the Provincial Inspectorate is currently still under the Provincial Secretary. Inspectors in districts/cities must be appointed by the Head of Province (Governor) through the Pansel and Provincial Inspectorates appointed by the Minister of Home Affairs. With this more tiered authority, the inspectorate will become an independent institution and can prevent corruption from occurring in its area without fear of being arrested by the regional head.

Keywords : Inspectorate, Regional Secretary, Governor, laws and regulations, authority of the inspectorate

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala kewenangan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Inspektorat Provinsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu direvisi untuk memperkuat kedudukan Inspektorat dalam kewenangannya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Pemerintah Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan adalah hal utama yang perlu direvisi karena posisi Inspektorat Provinsi saat ini masih berada dibawah Sekda Provinsi. Inspektur di kabupaten/kota, harus diangkat oleh Kepala Provinsi (Gubernur) melalui Pansel dan Inspektorat Provinsi diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya kewenangan yang lebih berjenjang ini, inspektorat akan menjadi lembaga yang mandiri dan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadinya di daerahnya tanpa takut akan dipecat oleh kepala daerahnya.

Kata Kunci : Inspektorat, Sekda, Gubernur, peraturan perundang-undangan, kewenangan inspektorat

DAFTAR ISI

Abstract	vi
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA DASAR TEORI	7
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Kerangka Dasar Teori	8
2.2.1. Pengawasan	8
2.2.2. Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.2.3. Hambatan Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3. Critical Review.....	18
BAB III.....	20
METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Lokasi dan Subyek Penelitian	20
3.3. Teknik Pengumpulan Data	20
3.4. Analisis Data	21
BAB IV	22
GAMBARAN UMUM INSTANSI	22
BAB V.....	25
HASIL PENELITIAN.....	25
5.1. Gambaran Umum Tentang Kewenangan	25
5.2. Implementasi Kewenangan Inspektorat saat ini	26
5.3. Kendala Yang Dihadapi Inspektorat Dalam Hal Kewenangan Saat Ini	28
5.4. Pembahasan Hasil Penelitian.....	30
5.4.1. Dasar Hukum kewenangan Inspektorat Provinsi.....	30
5.4.2. Implementasi kewenangan yang dijalankan saat ini.....	33
5.4.3. Kendala yang dihadapi saat ini.....	35
5.5. KESIMPULAN	37
5.6. REKOMENDASI.....	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kedudukan Hirarkis Inspektorat.....	23
Gambar 5.1 kedudukan hirarkis BPK.....	32
Gambar 5.2 Alternatif kedudukan Inspektorat Provinsi.....	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara.....	42
Lampiran foto Wawancara.....	44